

DAFTAR ISIAN

TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: BATU NYADI

Kecamatan: Ketungau Hilir

Kabupaten: KAB. SINTANG

Provinsi: KALIMANTAN BARAT

Bulan: 10

Tahun: 2019

Nama Pengisi: MURIN

Pekerjaan: SWASTA

Jabatan: SEKRETARIS DESA

Kepala Desa / Lurah: INSUN

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN

UNTUK MENGISI PROFIL

DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : TAPAL BATAS

Referensi 2: SUNGAI

Referensi 3: JALAN

Referensi 4: TEMAWANG

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	564 orang	424 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	548 orang	396 orang
Persentase perkembangan	2.92 %	7.07 %

B. Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	192 KK	29 KK	221 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	178 KK	23 KK	201 KK
Prosentase Perkembangan	7.87 %	26.09 %	

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	749 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	0 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	178 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	28 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	84 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	3 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0 orang

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera	0 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	0 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	0 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	2 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	1 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	3 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)

prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_tingkat/laporan_terkini_tingkat.php?&tahun=2019&kodesa=6107190019

1/17

Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan
D. SUBSEKTOR PERIKANAN						
E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN						
Total nilai produksi tahun ini					Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan					Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan					Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabiskan					Rp. 0,00	
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada					0 jenis	
F. SUBSEKTOR KERAJINAN						
Total nilai produksi tahun ini					Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan					Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan					Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabiskan					Rp. 0,00	
Total jenis kerajinan rumah tangga					0 jenis	
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN						
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN						
Total nilai produksi tahun ini					Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan					Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan					Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabiskan					Rp. 0,00	
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN						
I.1. Subsektor Perdagangan Besar						
Total nilai transaksi					Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan yang ada					Rp. 0,00	
Total jumlah jenis perdagangan besar					Rp. 0,00	
Total nilai biaya yang dikeluarkan					Rp. 0,00	
Total biaya antara lainnya					Rp. 0,00	
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran						
Jumlah total jenis perdagangan eceran					0 jenis	
Total nilai transaksi					Rp. 0,00	
Total nilai biaya yang dikeluarkan					Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan eceran					Rp. 0,00	
I.3. Subsektor Hotel						
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada					0 jenis	
Jumlah total pendapatan					Rp. 0,00	
Jumlah total biaya pemeliharaan					Rp. 0,00	
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan					Rp. 0,00	
Jumlah total pendapatan yang diperoleh					Rp. 0,00	
I.4. Subsektor Restoran						
Jumlah tempat penyediaan konsumsi					0 Unit	
Biaya konsumsi yang dikeluarkan					Rp. 0,00	
Biaya antara lainnya					Rp. 0,00	
Jumlah total pendapatan yang diperoleh					Rp. 0,00	
J. Sektor Bangunan/Konstruksi						
Jumlah bangunan yang ada tahun ini					0 unit	
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan					Rp. 0,00	
Total nilai bangunan yang ada					Rp. 0,00	
Biaya antara lainnya					Rp. 0,00	
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan						
K.1. Subsektor Bank						
Jumlah transaksi perbankan					Rp. 0,00	
Jumlah nilai transaksi perbankan					Rp. 0,00	
Jumlah biaya yang dikeluarkan					Rp. 0,00	

K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	0 Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	0 Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
K.3. Subsektor Sewa Bangunan	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	0 unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan	
Jumlah perusahaan jasa	0 Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
L. SEKTOR JASA-JASA	
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	0 unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
L.2. Subsektor jasa swasta	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	0 jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	0 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	0 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	
M.1. Subsektor Angkutan	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan	Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 0,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 0,00
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	
N.1. Subsektor Listrik	
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	Jenis
Jumlah nilai produksi listrik	Rp 0,00
Jumlah total nilai transaksi	Rp 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
N.2. Subsektor Gas	
Jumlah kegiatan penyediaan gas	jenis
Nilai aset produksi gas	Rp 0,00
Nilai transaksi	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
N.3. Subsektor Air Minum	
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp 0,00
Nilai produksi air minum	Rp 0,00
Nilai transaksi air minum	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00

IV. PENDAPATAN PERKAPITA**A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha****B. PENDAPATAN RILL KELUARGA**

Jumlah Kepala Keluarga	KK
Jumlah Anggota Keluarga	orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 0,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 0,00

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

1. Sektor Pertanian	
Petani	34 orang
Buruh Tani	135 orang
Pemilik Usaha Tani	23 orang
2. Sektor Perkebunan	
Karyawan Perusahaan Perkebunan	15 orang
Buruh perkebunan	85 orang
Pemilik usaha Perkebunan	92 orang
3. Sektor Peternakan	
Peternakan Perorangan	5 orang
Buruh Usaha Peternakan	0 orang
Pemilik Usaha Peternakan	5 orang
4. Sektor Perikanan	
Nelayan	orang
Buruh Usaha Perikanan	orang
Pemilik Usaha Perikanan	orang
5. Sektor Kehutanan	
Pengumpul Hasil Hutan	orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	orang
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
Penambang Galian C Perorangan	orang
Buruh Usaha Pertambangan	orang
Pemilik Usaha Pertambangan	orang
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
Montir	0 orang
8. Sektor Industri Menengah dan Besar	
9. Sektor Perdagangan	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	0 orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	0 orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	0 orang
10. Sektor Jasa	
Pegawai Negeri Sipil	2 orang
Bidan swasta	1 orang
Guru swasta	6 orang
Sopir	12 orang

VI. PENGUSAHAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

A. ASET TANAH	
Tidak memiliki tanah	0 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	5 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	23 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	19 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	24 orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	19 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	21 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	16 orang

Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	24 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	12 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	21 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	16 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	52 orang
Jumlah total penduduk	0 orang
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM	
C. ASET SARANA PRODUKSI	
Memiliki penggilingan padi	orang
Memiliki traktor	orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	orang
Memiliki kapal penangkap ikan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	orang
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING	
RUMAH MENURUT LANTAI	
RUMAH MENURUT ATAP	
VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA	
VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT	
A. Tingkat Pendidikan Penduduk	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	74 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	1 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	0 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	158 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	42 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	56 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	18 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	29 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	15 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	32 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	46 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	0 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	0 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	9 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	15 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	0 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	4 orang
B. Wajib belajar 9 tahun	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	62 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	127 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	28 orang
C. Rasio Guru dan Murid	

1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	0 orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	0 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	5 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	125 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	0 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	14 orang
7. Jumlah guru SLTA/sederajat	0 orang
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat	12 orang
9. Jumlah siswa SLB	0 orang
10. Jumlah guru SLB	0 orang

D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat

Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	0 unit
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan	0 unit
Jumlah perpustakaan keliling	0 unit
Jumlah sanggar belajar	0 unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	0 kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	0 kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C	0 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	0 unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	0 orang

IX. KESEHATAN MASYARAKAT**A. Kualitas Ibu Hamil**

Jumlah ibu hamil	32 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	32 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	12 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	32 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	5 orang
Jumlah ibu nifas	5 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	0 orang

B. Kualitas Bayi

Jumlah keguguran kandungan	2 orang
Jumlah bayi lahir	11 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	11 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	2 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	13 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 orang

C. Kualitas Persalinan**Tempat Persalinan**

Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	0 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	0 unit
Tempat persalinan Puskesmas	0 unit
Tempat persalinan Polindes	0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	0 unit
Tempat praktek dokter	0 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit

Pertolongan Persalinan

Jumlah Persalinan ditolong Dokter	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan

D. Cakupan Imunisasi

Jumlah Bayi usia 2 bulan	5 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	0 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	3 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	0 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	2 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	0 orang
Jumlah bayi 9 bulan	6 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	4 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	20 orang

E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB**Pasangan Usia Subur**

Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	0 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	53 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	17 orang
Jumlah pasangan usia subur	112 pasangan

Keluarga Berencana

Jumlah akseptor KB	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	13 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	82 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	0 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	17 orang

F. Wabah Penyakit**Demam berdarah**

Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	5 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian

G. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	0,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	0,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi	0,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional	0,00 Tahun

H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih

1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	62 Keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	0 Keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	76 Keluarga
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	0 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	73 Keluarga
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	42 Keluarga
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	0 Keluarga
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 Keluarga
Total jumlah keluarga	0 Keluarga

I. Perilaku hidup bersih dan sehat

Kebiasaan buang air besar	
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	106 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	41 Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	86 Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	25 Keluarga

Pola makan

Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Tidak
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	Ada

Kebiasaan berobat bila sakit		
Dukun Terlatih	Tidak ada	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Sedikit	
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	Tidak ada	
Paranormal	Tidak ada	
Obat tradisional dari keluarga sendiri	Tidak ada	
Tidak diobati	Sedikit	
J. Status Gizi Balita		
Jumlah Balita	30 orang	
Jumlah Balita bergizi buruk	8 orang	
Jumlah Balita bergizi baik	19 orang	
Jumlah Balita bergizi kurang	3 orang	
Jumlah Balita bergizi lebih	0 orang	
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini		
Jenis penyakit	Jumlah penderita	Di rawat di
Malaria	5 orang	Puskesmas
Asma	1 orang	Rumah
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat		
Jumlah MCK Umum	2 unit	
Jumlah Posyandu	2 unit	
Jumlah kader Posyandu aktif	10 orang	
Jumlah pembina Posyandu	1 orang	
Jumlah Dasawisma	0 Dasawisma	
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	0 orang	
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	0 orang	
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	2 orang	
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi	
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi	
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi	
Buku administrasi Posyandu lainnya	0 jenis	
Jumlah kegiatan Posyandu	0 jenis	
Jumlah kader kesehatan lainnya	0 orang	
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	0 jenis	
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	0 jenis	
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	0 jenis	
Lainnya	0 jenis	
X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
A. Konflik SARA		
Kasus konflik pada tahun ini	kasus	
Kasus konflik SARA pada tahun ini	kasus	
Jumlah kasus pertengkar dan atau perkelahian antar tetangga	kasus	
Jumlah kasus pertengkar dan atau perkelahian antar RT/RW	kasus	
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	kasus	
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	kasus	
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	kasus	
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00	
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	orang	
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	orang	
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	orang	
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	orang	
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	kasus	
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	orang	
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00	
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	buah	
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	rumah	
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	orang	
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	orang	
Jumlah janda akibat konflik Sara	orang	
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	orang	
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	orang	
B. Perkelahian		
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	kasus	
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	kasus	
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	kasus	
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	kasus	
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	orang	

C. Pencurian

Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	orang

D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah

Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat	kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	orang

E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan

Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	orang

F. Pemakaian Miras dan Narkoba

Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	kasus
Jumlah pengedar Narkoba	orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	orang

G. Prostitusi

Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	orang
Lokalisasi prostitusi	
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	kali

H. Pembunuhan

Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus bunuh diri	kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	kasus

I. Penculikan

Jumlah kasus penculikan	kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	kasus

J. Kejahatan seksual

Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	unit

K. Masalah Kesejahteraan Sosial

Jumlah gelandangan	orang
Jumlah pengemis jalanan	orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	orang
Jumlah orang cacat fisik	orang
Jumlah orang kelainan kulit	orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	unit
Jumlah panti jompo	unit

Jumlah panti asuhan anak	unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	orang
Jumlah anak yatim usia 0-18 tahun	orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	orang
Jumlah anak yatim piatu 0-18 tahun	orang
Jumlah janda	orang
Jumlah duda	orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat	orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat	orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat	orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	orang
Jumlah penduduk eks NAPI	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	orang

L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	kasus

M. Teror dan Intimidasi

Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	kasus

N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta

Organisasi Siskamling	
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda	RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	
Buku anggota Hansip dan Linmas	jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	Pos

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara

Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	orang

Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	kasus
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi	
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	jenis
Jumlah Wajib Pajak	orang
Target PBB	Rp 0,00
Realisasi PBB	0,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar	kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	kasus
C. Partisipasi Politik	
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	pemilih
2. Pemilihan Kepala Daerah	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	pemilih
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan	
Penentuan Jabatan Kepala Desa	
Penentuan Sekretaris Desa	
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	
Masa jabatan Kepala Desa	tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	
4. Pemilihan BPD	
Jumlah anggota BPD	orang
Penentuan anggota BPD	
Pimpinan BPD	
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	
Anggaran untuk BPD	

Produk keputusan BPD tahun ini	1. Peraturan Desa buah
	2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa kali
	3. Rancangan Peraturan Desa. buah
	4. Menyalurkan aspirasi masyarakat kali
	5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa kali
	6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa kali
	7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa kali

5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	0,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	

C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan	
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	0,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	0,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	0,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	0,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	0,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	kegiatan
Pemilihan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	
Pemilihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	
Pemilihan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	. kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	. kegiatan
2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan	
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	0,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	0,00 %

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	0,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	0,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	0,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	0,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	kegiatan
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk	
Jumlah kelompok arisan	buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	orang
Ada tidaknya dana sehat	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	
4. Adat Istiadat	
Adat istiadat dalam perkawinan	
Adat istiadat dalam kelahiran anak	
Adat istiadat dalam upacara kematian	
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	
Adat istiadat dalam tanah pertanian	
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	
5. Sikap Dan Mental Masyarakat	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	

Etos Kerja Penduduk

Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	

XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN**A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN**

Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Tidak
Jumlah kegiatan	Jenis

B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan**

Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 0,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 0,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 0,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 0,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 0,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 0,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 0,00

B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD	
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	kasus

C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan**1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**

Gedung Kantor	-
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	
Listrik	
Air bersih	
Telepon	

1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor

Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	unit
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	
Buku Administrasi Kependudukan	
Buku Data Inventaris	
Buku Data Aparat	
Buku Data Tanah Kas Desa	
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	
Buku Data Tanah	
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	
Buku Agenda Ekspedisi	
Buku Profil Desa dan Kelurahan	
Buku Data Induk Penduduk	
Buku Data Mutasi Penduduk	
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	
Buku Data Penduduk Sementara	
Buku Anggaran Penerimaan	
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	
Buku Kas Umum	
Buku Kas Pembantu Penerimaan	
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
Gedung Kantor	
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai BPD	-
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
2.B. Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	
Buku kegiatan BPD	
Buku himpunan peraturan desa	
Buku Lainnya	
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	
Alat tulis kantor	
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jenis kegiatan	Jenis
Jumlah pengurus	Orang
Jumlah ruang kerja	Ruang
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD	

Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	kali
2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	kasus
4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan	
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	kali

Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	kali

KAB. SINTANG, 10 Oktober 2019
 BATU NYADI
 Kecamatan Ketungau Hilir
 Kabupaten KAB. SINTANG

INSUN
 Kepala Desa

Tembusan :
 1. Camat Ketungau Hilir
 2. Bupati KAB. SINTANG
 3. Arsip